

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023

Nurhuda¹, Prima Yusi Sari²

Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

nurhuda21001@mail.unpad.ac.id, prima.yusi@unpad.ac.id**Abstract**

This study aims to analyze and describe the characteristics of the financial performance of the Malang City Government from 2018 to 2023. The financial performance was measured using seven financial dimensions developed by Ritonga (2014), including Short-Term Financial Solvency, Long-Term Financial Solvency, Budgetary Solvency, Financial Independence, Financial Flexibility, Service Solvency, and Operational Solvency. This study uses a descriptive qualitative approach with secondary data obtained from the audited financial reports of the Malang City Government for the years 2018-2023, as well as data from the Central Bureau of Statistics (BPS) Malang City. Data were collected through documentation and literature study techniques. The results show that the financial performance of the Malang City Government during 2018-2023 falls into the "Satisfactory" category, with an average composite index score of 0.52. This result was influenced by the Financial Flexibility dimension, which had the highest average index of 0.66 or "Good" driven by an increase in normal revenue. Meanwhile, the Short-Term Financial Solvency dimension had the lowest average index of 0.42 or "Poor" due to a decline in current assets. Furthermore, the analysis of financial condition characteristics shows that the year with the highest composite index was associated with higher population size, population density, community welfare, financial efficiency, and goods and services expenditure, as well as a lower average working-age population profile compared to the year with the lowest index.

Keywords: *Financial Performance, Local Government, Short-Term Financial Solvency, Long-Term Financial Solvency, Budgetary Solvency, Financial Independence, Financial Flexibility, Service Solvency, and Operational Solvency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menggambarkan karakteristik kondisi atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang diukur dengan menggunakan tujuh dimensi keuangan dalam metode pengukuran yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), yaitu dimensi Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek, Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Layanan, dan Solvabilitas Operasional. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Audited Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

2023 berada dalam kategori Cukup Sehat, dengan rata-rata nilai indeks komposit sebesar 0,52. Capaian ini dipengaruhi oleh dimensi fleksibilitas keuangan yang mencatat rata-rata indeks tertinggi sebesar 0,66 atau Sehat, yang disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan normal, serta dimensi solvabilitas keuangan jangka pendek yang mencatat rata-rata indeks terendah sebesar 0,42 atau Kurang Sehat, yang disebabkan oleh penurunan pada aset lancar. Selanjutnya, hasil analisis karakteristik kondisi keuangan menunjukkan bahwa tahun dengan indeks komposit tertinggi memiliki jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat kemakmuran masyarakat, efisiensi keuangan, dan biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, serta profil umur masyarakat yang lebih rendah dibandingkan tahun dengan indeks komposit terendah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek, Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Layanan, Solvabilitas Operasional

1. Pendahuluan

Menurut informasi yang dirilis dari Badan Informasi Geospasial, pada 2023 wilayah Indonesia memiliki 17.374 pulau yang membentang luas dari Sabang hingga ke Merauke, menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia dipimpin dan dijalankan oleh pemerintah (Karimi, 2024). Peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga kesatuan di tengah keragaman dan perubahan yang terjadi di negara yang besar ini.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 6, menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan:

“Suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah”. Konsep ini tidak hanya memberikan kekuasaan, tapi juga menimbulkan asas desentralisasi fiskal (Mega Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan kewenangan untuk dapat memformulasikan sebuah kebijakan dalam hal pengelolaan terhadap keuangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Edwar, 2016). Melalui desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah memiliki kesempatan besar untuk dapat menggali semua potensi di wilayahnya, sehingga diharapkan mampu membiayai pembangunan daerah dan menyelenggarakan pemerintahannya. Keberhasilan desentralisasi fiskal juga berkontribusi kepada peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah (Wibowo & Oktivalerina, 2022).

Dalam konteks kemandirian keuangan, pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah memegang peranan penting yang tercantum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD menyajikan informasi yang lengkap dan terperinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangan daerah mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dengan melakukan penilaian kinerja keuangan.

Menurut (Tumija & Sinta, 2022), pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah merupakan proses untuk dapat mengetahui tingkatan pencapaian atas hasil kerja pemerintah daerah dalam bidang keuangan, mencakup pemasukan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan berbagai indikator, termasuk model tujuh dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Model ini menggunakan dimensi dan indikator

yang lebih komprehensif karena dalam didasarkan pada ketersediaan informasi dalam laporan keuangan pada pemerintah daerah.

Dengan pengukuran yang rutin, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk dapat mengevaluasi anggaran secara optimal guna menjaga standar pelayanan publik yang tinggi serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efisien dan akuntabel. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga dapat menunjukkan seberapa baik kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya, mengurangi ketergantungan, dan mencapai kemandirian keuangan, sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang optimal.

Salah satu contoh kawasan yang menunjukkan peningkatan dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik adalah Malang Raya, yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Ketiga wilayah ini memiliki peran strategis dalam pembangunan regional di Jawa Timur. Untuk memahami dinamika pengelolaan fiskal dan administratif secara lebih komprehensif, berikut ini disajikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia terkait perbandingan karakteristik mendasar ketiga wilayah tersebut pada tahun 2023 sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan Karakteristik Malang Raya

Kategori (2023)	Kota Malang	Kota Batu	Kab. Malang
Indesk Pembangunan Manusia (%)	84,08	79,07	73
Luas Wilayah (Km)	110,06	194,17	3.473,44
Jumlah Penduduk (Jiwa)	847.182	221.714	2.703.175
Dimensi Keuangan (IPKD)	69,365 - PB	66,166 - PB	77,137 - PB
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	792.120.013.218	222.283.041.898	1.025.586.055.284
Laporan Keuangan (BPK RI)	13x WTP	9x WTP	10x WTP
PDRB Perkapita (Rp)	107.541	93.209	47.272
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6	6,19	5

Sumber: Data BPS Tahun 2023 (diolah peneliti, 2025).

Ketiga wilayah ini, meskipun saling terhubung secara geografis, sosial, dan ekonomi, menunjukkan karakteristik fiskal dan administratif yang berbeda. Keragaman tersebut menjadikan Malang Raya sebagai konteks yang relevan untuk menganalisis dinamika kinerja dan kemandirian keuangan daerah. Dalam lingkup tersebut, Kota Malang menonjol dengan capaian IPM tertinggi sebesar 84,08%, pendapatan per kapita Rp107,541, lebih tinggi dibandingkan Kota Batu maupun Kabupaten Malang, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 13 kali, serta laju pertumbuhan ekonomi yang dinamis, mencapai 6%. Selain itu, berdasarkan jumlah penduduk, Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota ini telah mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan visi dan misi daerah, yang menjadikannya sebagai Switzerland van Java, Kota Wisata, Kota Pendidikan, Kota Industri Jasa dan Ekonomi Kreatif, serta Kota Sejarah. Pertumbuhan ini juga menjadi bukti konsistensi penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan. Seiring dengan itu, Kota Malang turut menghadapi tantangan global, yaitu Covid-19 yang mulai menyebar ke wilayah Indonesia. Kehadiran virus ini

mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif dengan menerapkan kebijakan refocusing serta realokasi anggaran di berbagai bidang. Kebijakan ini dituangkan melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona, serta Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Covid-19 (Vebiani et al., 2022). Dampaknya dirasakan di seluruh sektor, yang menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, terutama pada tahun 2020.

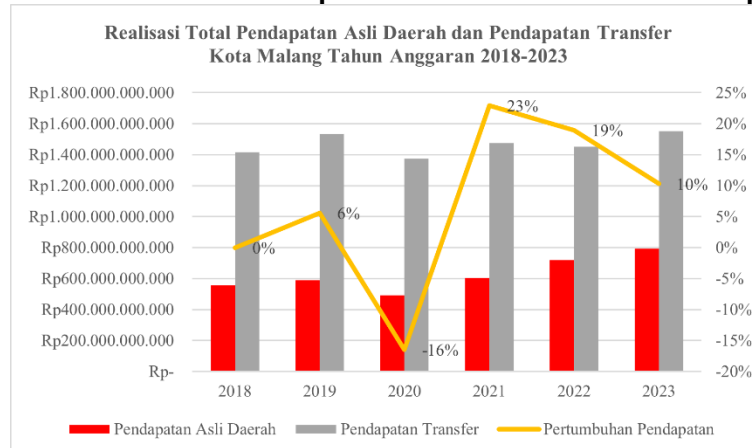
Gambar 1. 1 Realisasi Total Pendapatan dan Belanja



Sumber: malangkota.go.id/realisasi-apbd (diolah peneliti, 2025).

Sementara itu, dapat disimpulkan juga bahwa Kota Malang juga mengalami defisit anggaran selama periode 2020 hingga 2023. Defisit ini muncul dikarenakan realisasi pengeluaran belanja melebihi realisasi pendapatan. Di sisi lain, tercatat juga bahwa pendapatan transfer Kota Malang lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (Gambar 1.2). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Malang masih bergantung besar pada alokasi dana dari pusat, yaitu Pendapatan Transfer. Selain itu, pada kurun waktu yang sama, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Penurunan paling mencolok terjadi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah merosot hingga -16% akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Gambar 1. 2 Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer



Sumber: malangkota.go.id/realisasi-apbd (diolah peneliti, 2025).

Perbandingan antara realisasi dan target anggaran pendapatan asli daerah Kota Malang juga menunjukkan pola yang fluktuatif (Tabel 1.3). Pada 2018, realisasi melebihi target sebesar 105,43%. Namun, pada 2019 dan 2020, turun menjadi 95,92% dan 92,96%. Meskipun pandemi Covid-19 melanda, pada 2021 realisasi pendapatan asli daerah Kota Malang malah mengalami kenaikan menjadi 98,33% dan terus naik hingga 100,04% pada 2022. Setelah pandemi mereda, kinerja keuangan Kota Malang kembali mengalami penurunan menjadi 79,07% pada 2023, meskipun pada sisi anggaran meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Anggaran dengan Realisasi PAD Kota Malang Tahun 2018-2023

Tahun	Target Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Presentase (%)
2018	528.207.937.856	556.888.383.143	105,43
2019	613.052.028.554	588.066.042.351	95,92
2020	532.371.417.403	491.189.243.955	92,96
2021	614.067.445.482	603.795.666.883	98,33
2022	718.028.603.480	718.337.240.633	100,04
2023	1.001.792.007.861	792.120.013.218	79,07

Sumber: malangkota.go.id/realisasi-apbd (diolah peneliti, 2025).

Prestasi ini tentu bukan hal yang mudah diraih, mengingat kompleksitas serta berbagai tantangan yang dihadapi. Namun demikian, Pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan secara konsisten hingga saat ini. Keberhasilan ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Salah satu studi relevan adalah penelitian karya Galuh Jati Asmara (2024) yang berjudul “Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016-2020”.

Penelitian tersebut menggunakan metode Ritonga (2014) sebagai alat ukur kinerja keuangan, dan pendekatan yang sama juga diterapkan dalam penelitian ini. Temuan dari studi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan performa yang relatif baik dalam beberapa dimensi keuangan, terdapat variasi antar kabupaten/kota di wilayah DIY. Sejalan dengan temuan tersebut, pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan, khususnya rentang tahun 2018-2023, menjadi krusial untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara bertanggung jawab.

Berdasarkan kejadian-kejadian yang telah dijelaskan secara detail pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Malang terkait analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini secara khusus akan berfokus pada analisis pengukuran kinerja keuangan sebagai salah satu bentuk evaluasi atas efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Ruang lingkup waktu yang dikaji mencakup periode tahun 2018 hingga 2023, sebagaimana tercantum dalam judul penelitian: “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023” dengan menjawab pertanyaan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun 2018-2023 serta dimensi, pos keuangan apa saja yang memengaruhi, dan bagaimana karakteristik kondisi

kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 berdasarkan metode Ritonga (2014).

2. Tinjauan Pustaka

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 2 merupakan “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam hal ini, kepala daerah lah yang mengatur birokrasi dan melayani masyarakat (Solihah, 2019, pp, 5, 12). Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah memiliki fungsi dan tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin keberlangsungan pembangunan, tidak hanya terbatas pada pengelolaan administrasi lokal (Achmad & Zubakhrum, 2024). Adapun fungsi pemerintahan daerah meliputi pelayanan publik, pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, koordinasi, dan pengawasan.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6 merupakan “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi daerah juga merupakan sebuah konsep di mana pemerintah pusat dapat memberikan sebagian kewenangannya ke pemerintah daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya berdasarkan prinsip desentralisasi (Achmad & Zubakhrum, 2024:4). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada tiga asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan.

Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan Pemerintah Daerah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Pengertian tersebut menegaskan bahwa keuangan daerah merupakan instrumen utama yang mencakup keseluruhan aspek fiskal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk kas, aset, maupun kewajiban. Dalam implementasinya, aspek utama yang harus diperhatikan adalah proses perencanaan hingga penganggaran, yang diawali melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah” (Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). APBD ini terdiri dari berbagai elemen utama lainnya yang meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus

kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan”. Laporan keuangan tersebut terdiri atas beberapa komponen utama yang harus disajikan secara lengkap dan sistematis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan “keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga diartikan sebagai hasil evaluasi di bidang keuangan atas berbagai program serta kegiatan yang telah dijalankan dengan menggunakan indikator atau parameter keuangan dalam kurun waktu satu tahun anggaran (Dilliana & Herdi, 2022:24). Dalam konteks kinerja keuangan pemerintah daerah, Deacon (1987) dalam Ritonga (2014) berpendapat bahwa hukum permintaan dan penawaran turut memengaruhi dalam belanja publik. Hukum permintaan menjelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta, di mana kenaikan harga akan menurunkan jumlah permintaan, sedangkan penurunan harga akan meningkatkan permintaan. Sebaliknya, hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan; semakin tinggi harga, semakin besar jumlah yang ditawarkan, dan sebaliknya (Priyono, 2018).

Berdasarkan sudut pandang hukum permintaan dan penawaran, kondisi keuangan daerah tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ritonga (2014) mengelompokkan faktor-faktor tersebut ke dalam tiga kategori utama. Adapun kategori yang memengaruhi kondisi keuangan meliputi:

1. Sisi permintaan terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk.
2. Sisi permintaan terhadap barang dan jasa berdasarkan tingkat kemakmuran dan profil usia masyarakat.
3. Sisi penyediaan barang dan jasa yang mencakup kepadatan penduduk, basis pendapatan, efisiensi keuangan, dan biaya produksi.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah merupakan suatu metode pengukuran untuk dapat menilai apakah suatu organisasi, program, atau kegiatan yang dijalankan berhasil atau tidak dalam menjalankan proses bisnisnya dengan cara mengetahui perbedaan antara kinerja aktual dengan yang diharapkan (Dilliana & Herdi, 2022:24). Salah satu model yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pada pemerintah daerah secara komprehensif adalah model pengukuran yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Model ini mengukur kinerja keuangan berdasarkan tujuh dimensi utama. Adapun tujuh dimensi utama meliputi

Tabel 2.1 Formula Perhitungan Rasio

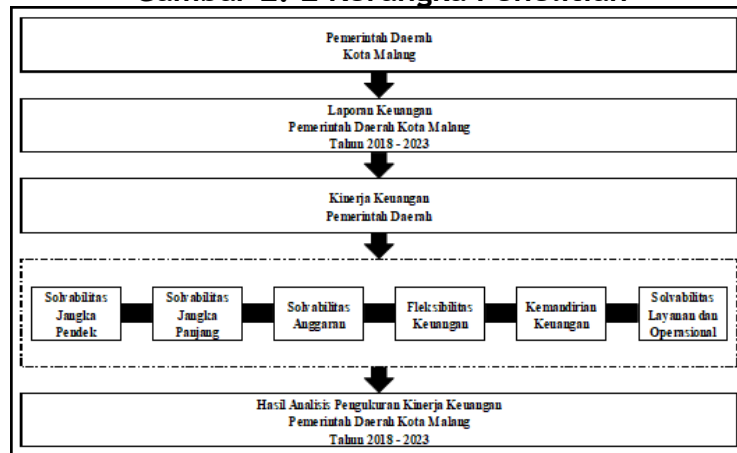
Dimensi	Rasio	Formula
Solvabilitas Anggaran	A	$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK)}{(Total\ Belanja - Belanja\ Modal)}$
	B	$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK)}{Belanja\ Operasional}$
	C	$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK)}{Belanja\ Pegawai}$
	D	$\frac{Total\ Pendapatan}{Total\ Belanja}$
Fleksibilitas Keuangan	A	$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK - Belanja\ Pegawai)}{(Pembayaran\ Pokok\ Pinjaman + Belanja\ Bunga)}$
	B	$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK - Belanja\ Pegawai)}{Jumlah\ Kewajiban}$
	C	$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK - Belanja\ Pegawai)}{Kewajiban\ Jk.\ Panjang}$
	D	$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK)}{Jumlah\ Kewajiban}$
Kemandirian Keuangan	A	$\frac{Total\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan}$
	B	$\frac{Total\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Belanja}$
Solvabilitas Jk. Pendek	A	$\frac{(Kas\ dan\ Setara\ Kas + Investasi\ Jk.\ Pendek)}{Kewajiban\ Lancar}$
	B	$\frac{(Kas\ dan\ Setara\ Kas + Investasi\ Jk.\ Pendek + Piutang)}{Kewajiban\ Lancar}$
	C	$\frac{Aktiva\ Lancar}{Kewajiban\ Lancar}$
Solvabilitas Jk. Panjang	A	$\frac{Total\ Aset}{Kewajiban\ Jk.\ Panjang}$
	B	$\frac{Total\ Aset}{Total\ Kewajiban}$
	C	$\frac{Ekuitas\ Dana\ Investasi}{Total\ Kewajiban}$
	A	$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK)}{Beban\ Operasional}$

Dimensi	Rasio	Formula
Solvabilitas Operasi	B	$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK)}{Beban\ Pegawai}$
	C	$\frac{Total\ Pendapatan}{Total\ Beban}$
Solvabilitas Layanan	A	$\frac{Total\ Ekuitas}{Penduduk}$
	B	$\frac{Total\ Aset}{Penduduk}$
	C	$\frac{Total\ Aset\ Tetap}{Penduduk}$
	D	$\frac{Total\ Belanja}{Penduduk}$
	E	$\frac{Total\ Belanja\ Modal}{Penduduk}$

Sumber: Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Ritonga, 2014).

Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian



Sumber: Peneliti (diolah peneliti, 2025)

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang diteliti dengan mempelajari secara mendalam seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti dalam memahami konteks secara mendalam dan menyeluruh.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Malang, yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 7, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur yang telah direncanakan dimulai pada Januari 2025 dan dijadwalkan selesai pada Juli 2025.

Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data kuantitatif yang dapat diukur secara statistik serta data kualitatif berupa kategori (Abdullah et al., 2022:64). Data ini berasal dari dokumen publik, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang yang telah diaudit oleh BPK RI selama kurun waktu 2018-2023, serta publikasi BPS Indonesia yang diakses melalui situs resmi malangkota.go.id dan malangkota.bps.go.id. Seluruh data tersebut merupakan data sekunder karena sudah tersedia secara publik dan perolehannya tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti (Saat & Mania, 2020:102).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang harus dihadapi oleh peneliti dalam mendapatkan sumber data penelitian atau informasi berdasarkan fakta yang ditemukan di lokasi penelitian (Daruhadi & Sopiati, 2024). Menurut Fiantika et al., (2022), secara umum teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, studi dokumen/kepuustakaan, serta triangulasi di mana penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi secara visual, verbal, tulisan, maupun dalam bentuk lainnya serta studi dokumen/kepuustakaan, yang melibatkan pengamatan dan analisis berbagai buku serta literatur yang relevan.

Teknik Analisis Data

Penentuan Kelompok Acuan (*Benchmark*)

Penentuan kelompok acuan (*benchmark*) merupakan langkah awal dengan mengelompokkan pemerintah daerah yang memiliki karakteristik serupa untuk mencapai homogenitas, meningkatkan keadilan, dan memperkuat daya banding antar daerah karena indeks yang dihasilkan merepresentasikan kondisi keuangan relatif antarpemerintah daerah yang setara (Ritonga, 2014). Adapun kelompok acuan (*benchmark*) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan time-series selama periode 2018 - 2023.

Perhitungan Rasio

Perhitungan rasio merupakan tahap lanjutan dengan membandingkan dua atau lebih komponen data keuangan (Ritonga, 2014). Dalam melakukan perhitungan rasio, tidak semua komponen dapat dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah seperti kewajiban jangka panjang pada Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023. Akibatnya, beberapa rasio keuangan menghasilkan nilai tak terhingga. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat mengasumsikan nilai tersebut sebesar 1 (satu). Asumsi ini dimaknai bahwa seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah dianggap mampu menjamin setiap rupiah dari kewajiban jangka panjangnya (Priyono, 2018). Apabila hasil perhitungan menunjukkan variasi nilai yang sangat ekstrem, maka perlu dilakukan transformasi data menggunakan metode seperti logaritma, eksponensial, atau pendekatan lain untuk menstabilkan distribusi nilai.

Perhitungan Indeks Indikator

Perhitungan indeks indikator merupakan proses penggabungan beberapa indikator atau variabel ke dalam satu nilai indeks yang terpadu karena adanya perbedaan satuan pada setiap dimensi dan indikator kondisi keuangan (Santos, 1999). Adapun formula yang digunakan untuk menghitung indeks indikator meliputi:

Tabel 3.2 Formula Perhitungan Indeks Indikator

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{(\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum})}{(\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum})}$$

Sumber: Sumber: Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Ritonga, 2014).

Perhitungan Indeks Dimensi

Perhitungan indeks dimensi merupakan rata-rata aritmatika dari indeks indikator karena rata-rata aritmatika memberikan hasil yang lebih representatif dibandingkan dengan rata-rata geometrik (Ritonga, 2014). Adapun formula yang digunakan untuk menghitung indeks indikator meliputi:

Tabel 3.3 Formula Perhitungan Indeks Dimensi

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{(I \text{ indikator}1 + I \text{ indikator}2 + \dots + I \text{ indikator}n)}{n}$$

Sumber: Sumber: Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Ritonga, 2014).

Perhitungan Indeks Komposit

Perhitungan indeks komposit merupakan rata-rata tertimbang dari indeks dimensi karena adanya perbedaan satuan pada setiap dimensi dan indikator kondisi keuangan (Santos, 1999). Tujuannya adalah untuk memberikan bobot yang proporsional terhadap masing-masing dimensi dalam mencerminkan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung indeks komposit meliputi:

Tabel 3.4 Formula Perhitungan Indeks Kompisit

$$\text{Indeks Komposit } x < 2014 = (w1 * DI1) + (w2 * DI2) + \dots + (wn * DI_n)$$

$$\text{Indeks Komposit } x > 2014 = \frac{\sum DI}{n}$$

Sumber: Sumber: Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Ritonga, 2014).

Dalam perhitungan indeks kompost sebelum tahun 2014, formula di atas mengacu pada Ritonga et al. (2012), berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Namun, ketentuan ini hanya berlaku hingga 2014 akibat perubahan kebijakan pada 2015, yang menyebabkan penambahan dimensi operasional. Sejak perubahan tersebut, bobot terbaru belum dapat ditentukan karena belum ada penelitian terbaru. Oleh karena itu, formula di atas diasumsikan memiliki nilai yang sama.

Pemeringkatan dan Deskripsi Kondisi Keuangan

Pemeringkatan kondisi keuangan merupakan tahapan akhir. Pada tahap ini, akan dilakukan pemeringkatan antar tahun berdasarkan nilai indeks komposit tertinggi ke rendah, yang bertujuan untuk menunjukkan kondisi keuangan relatif antar tahun pemerintah daerah.

Hasil pemeringkatan kemudian dibagi ke dalam tiga kategori, sebagaimana pengkategorian yang dilakukan oleh Ritonga (2014), dengan menggunakan pendekatan distribusi normal. Adapun kondisi keuangan yang dimaksud meliputi:

Tabel 3.5 Katgeori Kondisi Keuangan

Kategori	Keterangan
Sehat	Indeks Komposit $> (\text{Mean} + (1 \times \text{Standar Deviasi}))$
Cukup Sehat	Indeks Komposit diantara Kategori Sehat dan Tidak Sehat
Kurang Sehat	Indeks Komposit $< (\text{Mean} - (1 \times \text{Standar Deviasi}))$

Sumber: Sumber: Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Ritonga, 2014).

Deskripsi kondisi keuangan dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan indeks komposit tertinggi dan terendah. Analisis ini menggunakan teori permintaan dan penawaran yang dinyatakan Ohls dan Wales (1972), Hyman (1990) dalam Ritonga (2014). Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kondisi keuangan menurut Ritonga (2014) meliputi jumlah penduduk, profil umur, tingkat kemakmuran, kepadatan penduduk, pendapatan asli daerah, efisiensi keuangan, serta biaya barang dan jasa.

Operasional Variabel

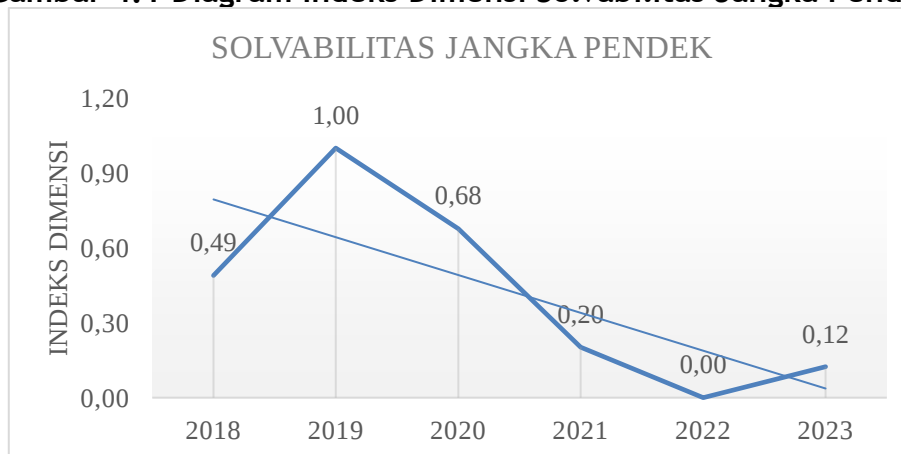
Operasional variabel merupakan cara untuk memahami arti dari setiap variabel dan konsep penelitian dengan segala bentuk apa pun berdasarkan karakteristik yang dirancang oleh peneliti, sehingga memperoleh informasi dan kesimpulan yang tidak rancu dalam pemahaman, pengukuran, serta analisisnya mengenai variabel yang telah ditetapkan (Amruddin et al., 2022:224).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio ini mengalami tren penurunan jika dibandingkan antara awal dengan akhir tahun penelitian. Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang, dalam kurun waktu tersebut, terdapat penurunan pada aset lancar sebesar Rp245.767.930.329 atau 41,10%. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya kemampuan pemerintah dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Di sisi lain, terdapat peningkatan pada kewajiban jangka pendek sebesar Rp299.319.589 atau 2,15%, menyebabkan lemahnya rasio karena tidak sebanding, namun masih dalam batas wajar.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio A, B, dan C pada Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 masing-masing tercatat sebesar 31,09; 37,12; dan 39,32 kali aset lancar untuk menjamin kewajiban jangka pendek. Penurunan trend nilai rasio tersebut menunjukkan sinyal positif bagi pemerintah karena mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan aset lancar yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik. Secara umum, solvabilitas keuangan jangka pendek Pemerintah Daerah Kota Malang berada pada tingkat yang baik, dengan aset lancar yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Gambar 4.1 Diagram Indeks Dimensi Solvabilitas Jangka Pendek

Sumber: Peneliti (diolah peneliti, 2025).

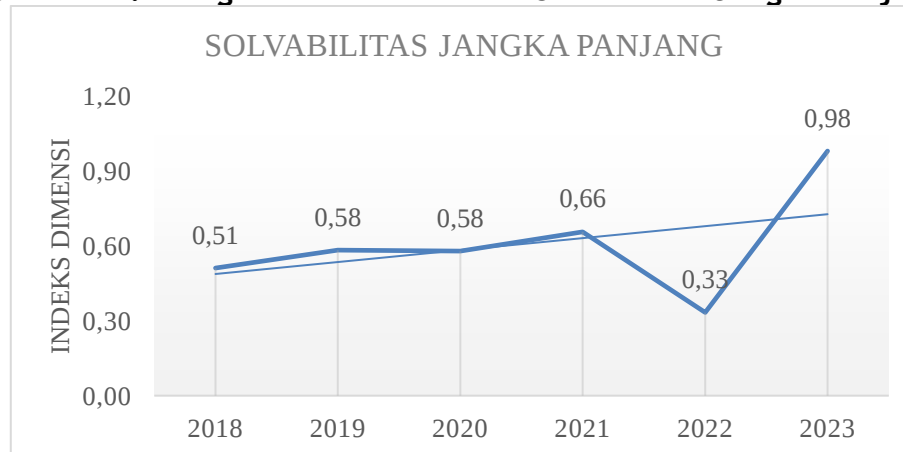
Nilai indeks tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 1,00. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan pada kas dan setara kas serta penurunan kewajiban jangka pendek dibandingkan tahun sebelumnya. Kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar Rp252.751.062.661 atau 51,58%. Sedangkan kewajiban jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp1.818.579.547 atau 13,07%. Penurunan ini disebabkan turunnya pendapatan diterima di muka, utang belanja, serta utang pihak ketiga lainnya sebesar Rp3.384.097.187 atau 24,32%.

Sebaliknya, nilai indeks terendah tercatat pada tahun 2022 sebesar 0,00. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu penurunan pada kas dan setara kas serta peningkatan kewajiban jangka pendek dibandingkan tahun sebelumnya. Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp23.840.288.734 atau 4,92%, sedangkan kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp17.831.461.164 atau 75,91%. Peningkatan ini disebabkan naiknya utang PFK, pendapatan diterima di muka, serta utang belanja sebesar Rp19.985.031.983 atau 99,70%, sehingga tidak sebanding.

Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio ini mengalami tren peningkatan jika dibandingkan antara awal dengan akhir tahun penelitian. Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang, dalam kurun waktu tersebut, terdapat peningkatan pada aset daerah sebesar Rp1.784.343.255.330 atau 27,90%, dan ekuitas dana investasi sebesar Rp2.030.111.185.659 atau 35,01%. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kemampuan pemerintah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Di sisi lain, tidak terdapat aktivitas pada kewajiban jangka panjang, menyebabkan kuatnya rasio.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio A, B, dan C pada Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 masing-masing tercatat sebesar 7.327.655.007.399; 435,76; dan 396,44 kali total aset untuk menjamin kewajiban jangka panjang. Peningkatan tren nilai rasio tersebut menunjukkan sinyal positif bagi pemerintah karena mencerminkan adanya peningkatan dalam struktur keuangan jangka Panjang melalui pertumbuhan kapasitas aset. Secara umum, solvabilitas keuangan jangka panjang Pemerintah Daerah Kota Malang berada pada tingkat yang baik, dengan total aset yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya.

Gambar 4.2 Diagram Indeks Dimensi Solvabilitas Jangka Panjang

Sumber: Peneliti (diolah peneliti, 2025).

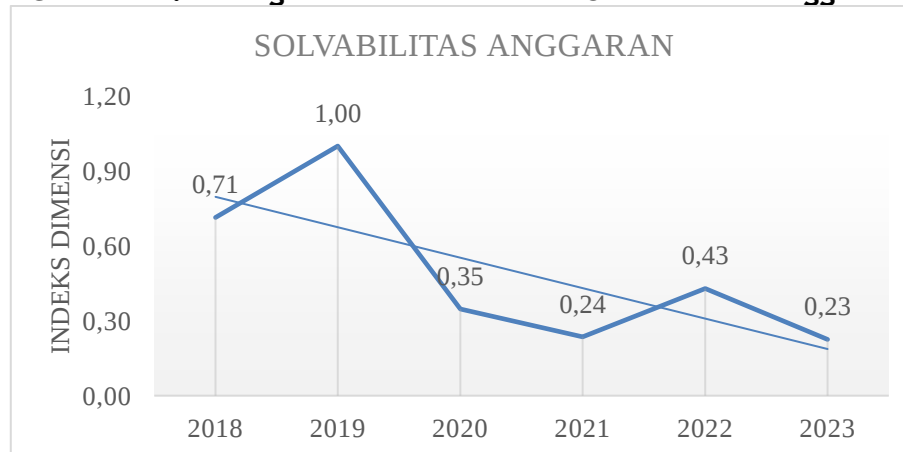
Nilai indeks terendah tercatat pada tahun 2022 sebesar 0,33. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan pada kewajiban daerah serta ekuitas dana investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Kewajiban daerah mengalami kenaikan sebesar Rp17.831.461.163 atau 75,91%, yang disebabkan naiknya kewajiban jangka pendek. Sedangkan ekuitas dana investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp138.152.603.578 atau 1,83%. Peningkatan ini disebabkan naiknya investasi jangka panjang, aset tetap, serta aset lainnya, sehingga tidak sebanding

Sebaliknya, nilai indeks tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 0,98. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan pada ekuitas dana investasi serta penurunan kewajiban daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Ekuitas dana investasi mengalami peningkatan sebesar Rp145.328.347.441 atau 1,89%, yang disebabkan naiknya aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp147.025.041.587 atau 2,05%. Sedangkan kewajiban daerah mengalami penurunan sebesar Rp27.105.554.030 atau 65,60%. Penurunan ini disebabkan turunnya kewajiban jangka pendek.

Solvabilitas Anggaran

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio ini mengalami tren penurunan jika dibandingkan antara awal dengan akhir tahun penelitian. Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang, dalam kurun waktu tersebut, terdapat peningkatan pada pendapatan normal sebesar Rp243.923.142.938 atau 13,14%. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya kemampuan pemerintah dalam mendapatkan pendapatan normal dalam mendanai operasionalnya. Di sisi lain, terdapat juga peningkatan pada pengeluaran operasional sebesar Rp617.059.883.180 atau 39,21%, menyebabkan lemahnya rasio karena tidak sebanding, namun masih dalam batas wajar.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio A, B, C, dan D pada Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 masing-masing tercatat sebesar 1,07; 1,09; 1,46; dan 1,00 kali pendapatan normal untuk membiayai belanja operasionalnya. Penurunan tren nilai rasio tersebut menunjukkan sinyal negatif bagi pemerintah karena mencerminkan adanya tekanan fiskal yang dapat mengganggu keberlanjutan pelayanan publik. Secara umum, solvabilitas anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang masih berada pada tingkat yang baik, dengan pendapatan normal yang cukup untuk membiayai operasionalnya.

Gambar 4. 3 Diagram Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran

Sumber: Peneliti (diolah peneliti, 2025).

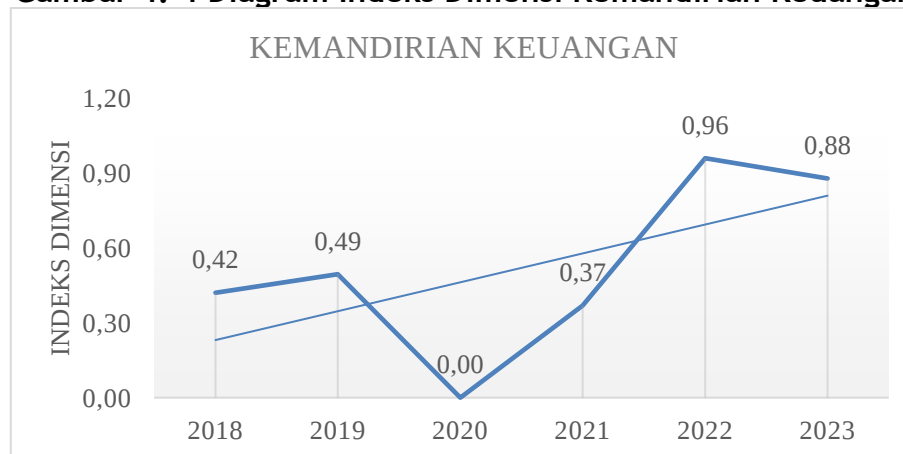
Nilai indeks tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 1,00. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan pada pendapatan normal serta pengeluaran operasional dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan normal mengalami kenaikan sebesar Rp146.361.808.738 atau 7,89%, yang disebabkan naiknya dana penyesuaian sebesar Rp48.371.078.000 atau 189,69%. Sedangkan pengeluaran operasional juga mengalami peningkatan sebesar Rp97.382.379.993 atau 6,19%. Peningkatan ini disebabkan naiknya belanja tak terduga sebesar Rp1.323.290.523 atau 3.882,83%.

Sebaliknya, nilai indeks terendah tercatat pada tahun 2023 sebesar 0,23. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan pada belanja operasional serta pendapatan normal dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja operasional mengalami peningkatan sebesar Rp316.944.019.881 atau 16,94%, yang disebabkan naiknya belanja hibah sebesar Rp68.397.168.764 atau 66,93%. Sedangkan pendapatan normal juga mengalami peningkatan sebesar Rp118.112.822.165 atau 5,96%. Peningkatan ini disebabkan naiknya pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp61.262.858.381 atau 26,30%, sehingga tidak sebanding.

Kemandirian Keuangan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio ini mengalami tren peningkatan jika dibandingkan antara awal dengan akhir tahun penelitian. Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang, dalam kurun waktu tersebut, terdapat peningkatan pada pendapatan asli daerah sebesar Rp235.231.630.075 atau 42,24%. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya kemampuan pemerintah dalam membiayai operasionalnya secara mandiri. Di sisi lain, terdapat juga peningkatan pada pendapatan daerah sebesar Rp304.621.704.371 atau 14,93%, dan belanja daerah sebesar Rp671.635.632.341 atau 34,89%, menyebabkan lemahnya rasio.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio A dan B pada Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 masing-masing tercatat sebesar 0,29; dan 0,29 kali pendapatan asli daerah yang berada di bawah kendali pemerintah. Peningkatan tren nilai rasio tersebut menunjukkan sinyal positif bagi pemerintah karena mencerminkan adanya peningkatan struktur pendapatan asli daerah. Secara umum, kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang berada pada tingkat yang belum stabil, karena masih bergantung pada sumber pendanaan di luar kendali atau eksternal.

Gambar 4. 4 Diagram Indeks Dimensi Kemandirian Keuangan

Sumber: Peneliti (diolah peneliti, 2025).

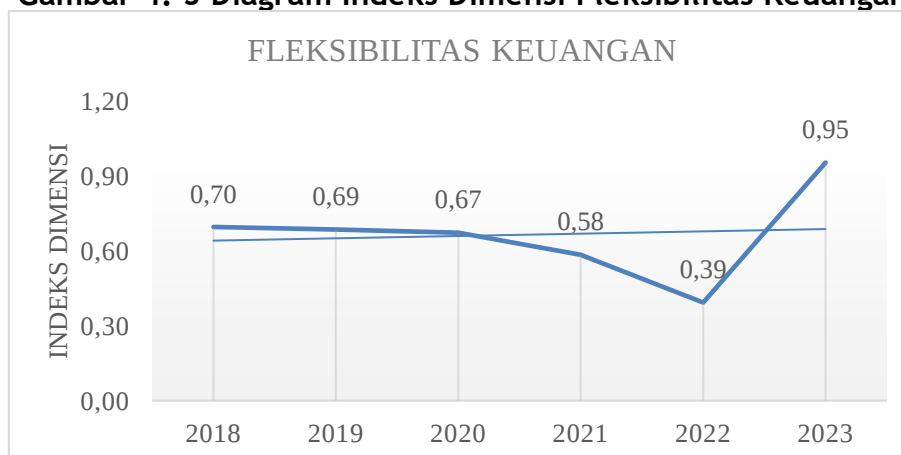
Nilai indeks terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,00. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu penurunan pada pendapatan asli daerah serta peningkatan belanja daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp96.876.798.396 atau 16,47%, yang disebabkan turunnya pendapatan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp116.444.092.118 atau 22,98%. Sedangkan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp193.692.233.078 atau 10,14%. Peningkatan ini disebabkan naiknya belanja tak terduga sebesar Rp53.257.438.287 atau 3.923,57%.

Sebaliknya, nilai indeks tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 0,96. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan pada pendapatan asli daerah serta penurunan belanja daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp114.542.626.512 atau 18,97%, yang disebabkan naiknya pendapatan pajak, retribusi, serta HPKD sebesar Rp121.392.312.988 atau 24,42%. Sedangkan belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp37.633.972.643 atau 1,69%. Penurunan ini disebabkan turunnya belanja tak terduga sebesar Rp39.172.658.746 atau 85,99%.

Fleksibilitas Keuangan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio ini mengalami tren peningkatan jika dibandingkan antara awal dengan akhir tahun penelitian. Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang, dalam kurun waktu tersebut, terdapat peningkatan pada pendapatan daerah setelah dikurangi pendapatan terikat dan belanja wajib sebesar Rp170.322.687.693 atau 15,56%. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi peningkatan komitmen. Di sisi lain, terdapat juga peningkatan pada kewajiban daerah sebesar Rp299.319.589 atau 2,15%, menyebabkan tingginya rasio.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio A, B, C dan D pada Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 masing-masing tercatat sebesar 958.860.160.189; 71,24; 1.160.626.045.469; dan 119,58 kali pendapatan normal untuk mengantisipasi peningkatan komitmen. Peningkatan tren nilai rasio tersebut menunjukkan sinyal positif bagi pemerintah karena mencerminkan adanya peningkatan kualitas fleksibilitas keuangan. Secara umum, fleksibilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang berada pada tingkat yang baik, dengan pendapatan normal yang cukup untuk peningkatan komitmen.

Gambar 4. 5 Diagram Indeks Dimensi Fleksibilitas Keuangan

Sumber: Peneliti (diolah peneliti, 2025).

Nilai indeks terendah tercatat pada tahun 2022 sebesar 0,39. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu penurunan pada pendapatan normal serta peningkatan kewajiban daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan normal mengalami penurunan sebesar Rp2.736.929.452 atau 0,14%, yang disebabkan turunnya pendapatan lainnya sebesar Rp72.682.644.946 atau 99,37%. Sedangkan kewajiban daerah mengalami peningkatan sebesar Rp17.831.461.164 atau 75,91%. Peningkatan ini disebabkan naiknya kewajiban jangka pendek, sehingga tidak sebanding.

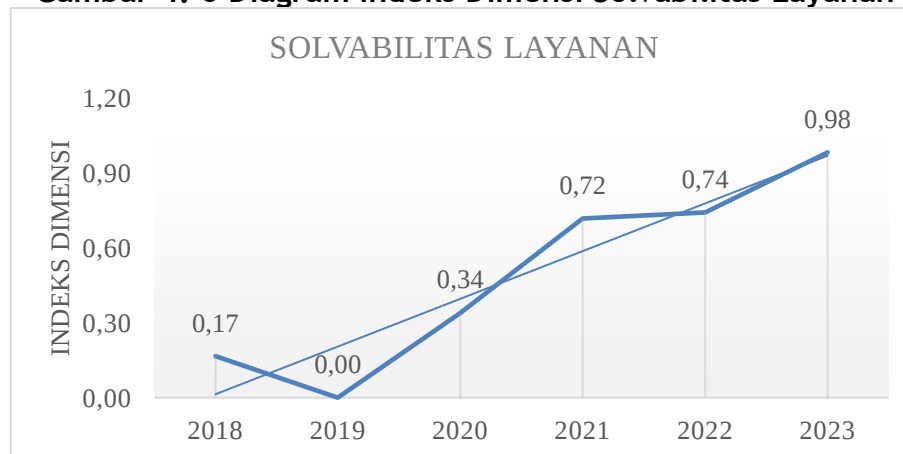
Sebaliknya, nilai indeks tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 0,95. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan pada pendapatan normal serta penurunan kewajiban daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan normal mengalami peningkatan sebesar Rp118.112.822.165 atau 5,96%, yang disebabkan naiknya seluruh komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp135.045.578.204 atau 14,20%. Sedangkan kewajiban daerah mengalami penurunan sebesar Rp27.105.554.030 atau 65,60%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya kewajiban jangka pendek.

Solvabilitas Layanan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio ini mengalami tren peningkatan jika dibandingkan antara awal dengan akhir tahun penelitian. Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang, dalam kurun waktu tersebut, terdapat peningkatan pada ekuitas daerah sebesar Rp1.784.043.935.740 atau 27,95%, dan belanja daerah sebesar Rp671.635.632.341 atau 34,89%. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya aset daerah serta meningkatnya belanja daerah dalam memberikan pelayanan publik. Di sisi lain, terdapat penurunan pada jumlah penduduk sebanyak 18.936 jiwa atau 2,19%, menyebabkan tingginya rasio.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio A, B, C, D, dan E pada Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 masing-masing tercatat sebesar 8.576.309; 8.599.431; 7.181.878; 2.532.459; dan 384.247 kali aset daerah untuk melayani setiap masyarakat. Peningkatan tren nilai rasio tersebut menunjukkan sinyal positif bagi pemerintah karena mencerminkan adanya peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Kota Malang berada pada tingkat yang baik, dengan jumlah aset daerah yang cukup untuk melayani setiap masyarakat.

Gambar 4. 6 Diagram Indeks Dimensi Solvabilitas Layanan



Sumber: Peneliti (diolah peneliti, 2025).

Nilai indeks terendah tercatat pada tahun 2019 sebesar 0,00. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu penurunan pada belanja modal serta peningkatan jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp112.677.729.542 atau 32,08%, yang disebabkan turunnya seluruh komponen belanja modal selain belanja tanah sebesar -Rp113.729.785.742 atau 32,38%. Sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 4.564 jiwa atau 0,53%. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan seluruh usia sehingga tidak sebanding.

Sebaliknya, nilai indeks tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 0,98. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan pada belanja modal serta jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp94.950.050.437 atau 30,55%, yang disebabkan naiknya belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya, dan belanja jalan, irigasi, serta jaringan sebesar Rp136.072.126.368 atau 154,36%. Sedangkan jumlah penduduk juga mengalami peningkatan sebesar 1.056 jiwa atau 0,12%. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan usia 45 keatas sebesar 5.833 jiwa atau 2,10%.

Solvabilitas Operasional

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio ini mengalami tren peningkatan jika dibandingkan antara awal dengan akhir tahun penelitian. Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang, dalam kurun waktu tersebut, terdapat peningkatan pada pendapatan normal sebesar Rp319.263.542.827 atau 17,55%. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya kemampuan pemerintah dalam mendapatkan pendapatan normal dalam mendanai operasionalnya. Di sisi lain, terdapat juga peningkatan pada belanja operasional sebesar Rp328.330.532.191 atau 15,24%, menyebabkan lemahnya rasio.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio A, B, dan C pada Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 masing-masing tercatat sebesar 0,93; 2,53; dan 1,02 kali pendapatan normal untuk membiayai belanja operasionalnya. Peningkatan tren nilai rasio tersebut menunjukkan sinyal positif bagi pemerintah karena mencerminkan adanya peningkatan pendapatan normal dalam mendanai operasionalnya. Secara umum, solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Kota Malang berada pada tingkat yang belum stabil, dengan pendapatan normal yang hampir memenuhi untuk membiayai operasionalnya pada sebagian rasio.

Gambar 4. 7 Diagram Indeks Dimensi Solvabilitas Operasional

Sumber: Peneliti (diolah peneliti, 2025).

Nilai indeks terendah tercatat pada tahun 2018 sebesar 0,00. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu penurunan pada pendapatan normal serta peningkatan beban operasional dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan normal mengalami penurunan sebesar Rp117.040.018.129 atau 6,04%, yang disebabkan turunnya pendapatan HPKD sebesar Rp125.096.422.301 atau 99,45%. Sedangkan belanja operasional mengalami peningkatan sebesar Rp425.557.761.616 atau 24,61%. Peningkatan ini disebabkan naiknya beban hibah sebesar Rp214.627.970.636 atau 249,66%.

Sebaliknya, nilai indeks tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 1,00. Capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan pada pendapatan normal serta penurunan beban operasional dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan normal mengalami peningkatan sebesar Rp259.934.778.801 atau 14,29%, yang disebabkan naiknya pendapatan HPKD sebesar Rp51.987.672.194 atau 7.558,87%. Sedangkan belanja operasional mengalami penurunan sebesar Rp196.357.611.667 atau 9,11%. Penurunan ini disebabkan turunnya beban hibah sebesar Rp226.885.091.036 atau 75,48%.

Perhitungan Indeks Komposit Keuangan, Pemeringkatan, dan Kondisi

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dan 2023, kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang memperoleh indeks komposit keuangan sebesar 0,68 dan 0,63 atau Sehat. Sementara itu, tahun 2022, 2021, 2018, dan 2020, memperoleh indeks komposit keuangan sebesar 0,50; 0,47; 0,43; dan 0,42 atau Cukup Sehat. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa karakteristik kondisi kinerja keuangan meliputi:

Gambar 4.8 Pemeringkatan Kota Malang Tahun 2018-2023

Peringkat		Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)	PDRB per Kapita (Juta per Jiwa)	Profil Umur		Efisiensi Keuangan (%)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Upah Minimum Kota (Rp)
						Usia Kerja	Non Usia Kerja			
1	0,68 - Sehat	2019	870.682	7.911	83,57	62,21	37,79	41,45	Rp 588.066.042.351,01	Rp 2.668.420,18
2	0,63 - Sehat	2023	847.182	7.627	109,84	62,98	37,02	32,15	Rp 792.120.013.218,17	Rp 3.194.143,98
3	0,50 - Cukup Sehat	2022	846.126	7.617	100,23	58,25	41,75	36,80	Rp 718.337.293.395,35	Rp 2.994.143,98
4	0,47 - Cukup Sehat	2021	844.933	7.677	90,68	61,07	38,93	37,39	Rp 603.794.666.883,32	Rp 2.970.502,73
5	0,43 - Cukup Sehat	2018	866.118	7.870	78,16	61,85	38,15	39,54	Rp 556.888.383.143,67	Rp 2.470.073,29
6	0,42 - Cukup Sehat	2020	843.810	7.667	85,52	60,03	39,97	34,67	Rp 491.189.243.955,35	Rp 2.895.502,74

Sumber: Data BPS Tahun 2023 (diolah peneliti, 2025).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 berdasarkan model Ritonga (2014) berada dalam kategori Cukup Sehat, dengan rata-rata nilai indeks komposit keuangan sebesar 0,52 yang dipengaruhi oleh dimensi fleksibilitas keuangan yang mencatat rata-rata indeks dimensi keuangan tertinggi sebesar 0,66 atau Sehat yang dipengaruhi oleh peningkatan pada pendapatan normal sebesar Rp243.923.142.938 atau 13,14%, yang disebabkan naiknya lain-lain PAD yang sah sebesar Rp54.796.966.964 atau 116,81% dan DBHP sebesar Rp53.230.681.402 atau 89,89% mencerminkan kuatnya kemampuan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam menghadapi peningkatan komitmen di masa depan dalam periode tersebut dan dimensi solvabilitas keuangan jangka pendek yang mencatat rata-rata indeks dimensi keuangan terendah sebesar 0,42 atau Kurang Sehat yang dipengaruhi oleh penurunan pada aset lancar sebesar Rp245.767.930.329 atau 41,10%, yang disebabkan turunnya kas dan setara kas sebesar Rp290.392.819.558 atau 59,26% mencerminkan lemahnya kemampuan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dalam periode tersebut. Adapun jika ditinjau berdasarkan karakteristik kondisi keuangan, menunjukkan tahun dengan indeks komposit tertinggi memiliki jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat kemakmuran masyarakat, efisiensi keuangan, dan biaya barang jasa yang lebih tinggi, serta profil umur masyarakat yang lebih rendah dibandingkan tahun dengan indeks komposit terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan yang sehat cenderung didorong oleh peningkatan pada aktivitas ekonomi.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 berdasarkan model Ritonga (2014), jika ditinjau berdasarkan karakteristik kondisi keuangan, menunjukkan tahun dengan indeks komposit tertinggi memiliki jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat kemakmuran masyarakat, efisiensi keuangan, dan biaya barang jasa yang lebih tinggi, serta profil umur masyarakat yang lebih rendah dibandingkan tahun dengan indeks komposit terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan yang sehat cenderung didorong oleh peningkatan pada aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, K., Jannah, M., Fadilla, Z., Ketut Ngurah Ardiawan, M., Eka Sari, M., & Hasda, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif (N. Saputra, Ed.; Juli 2022). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. <http://penerbitzaini.com>
- [2] Achmad, M., & Zubakhrum, M. B. (2024). Administrasi Pemerintahan Daerah (L. Dwi, Ed.). Askara Sastra.
- [3] Afifah, R. N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: BPKD Provinsi DKI Jakarta). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- [4] Amruddin, Priyanda, R., & Agustina, T. S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif (F. Sukmawati, Ed.; 1st ed.). CV. Pradina Pustaka Grup.
- [5] Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1st ed.). UB Press.
- [6] Anita. (2018). Analisis Laporan Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada PT. HM Sampoerna Tbk Periode 2013-2017). Universitas Fajar.
- [7] Asturi, B., Khairiah, D., & Anggara, Y. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu. JAKTIA: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi, 1(1), 41-49.
- [8] Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(5).

- [9] Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah* (D. Winarni, Ed.; 1st ed.). CV.Eureka Media Aksara.
- [10] Edwar, H. (2016). Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, XLII(1), 1-10.
- [11] Fauzan, H. M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya Periode 2009-2018. Universitas Siliwangi.
- [12] Febriani, M. (2022). Analisis Rasio Arus Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Politeknik Negeri Lampung.
- [13] Fiantika, F. R., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif (Maret 2022). PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- [14] Habibi, K. A., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19. *Majalah Neraca*, 17(1), 122-147. <https://jatengdaily.com>,
- [15] Hadinata, A. (2022). Optimalisasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Issue H) [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11641>
- [16] Julianti, C. I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta*.
- [17] Kamaroellah, A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah) (A. Rofiq, Ed.). CV. Jagad Media Publisher.
- [18] Karimi, S. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4, 1-10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4ix.526>
- [19] Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- [20] Nafi'ah, B. I. (2022). Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- [21] Nainggolan, E. O. (2022). Analisis Pendapatan Pajak Daerah Pada PAD Kota Pematangsiantar di Masa Pandemi Covid-19 [Politeknik Keuangan Negara STAN]. <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/2351>
- [22] Nurcholis, H., & Enceng. (2019). *Buku Ajar Administrasi Pemerintahan Daerah* (3rd ed.). Universitas Terbuka.
- [23] Priyono, C. (2018). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011-2015. *ABIS:Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1), 1-36. <https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59246>
- [24] Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti*, 15(1), 90-104.
- [25] Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (W. Putra, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- [26] Putri, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Provinsi DKI Jakarta Periode 2011-2021. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*.
- [27] Rachman, B. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019). *INNOVATIVE: Journal Of Social*

Science Research, 2, 11146.

- [28] Rakadewa, V. A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [29] Ritonga, I. T. (2014). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (1st ed.). Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah.
- [30] Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula (Muzakkir, Ed.; Edisi Revisi). Pusaka Almaida.
- [31] Santos, J. A. R. (1999). Cronbach's Alpha: A Tool for Assessing the Reliability of Scales. *Journal of Extension*, 37, 1-5.
- [32] Santoso, R. T., Syukri, M., Ermawati, D. A. P., & Hasanah, N. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.32477/jrabi.vxix.xxx>
- [33] Septarina, T. S. (2022). Implikasi Pelaksanaan Hibah terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi pada Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- [34] Shellyna, Putri, S. T., Yanty, Marcelino, & Akbar, M. A. (2022). Perbandingan Kepentingan antara Dana Darurat dan Dana Pensiun beserta Pengelolaannya. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(2), 205-216. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>
- [35] Solihah, R. (2019). Buku Ajar Pengantar Ilmu Pemerintahan (3rd ed.). Universitas Terbuka.
- [36] Sriyani, Oktantiasari, A., & Claudia, C. (2022). Penyajian Laporan Operasional Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo. *JMari*, 3(1), 86-101.
- [37] Sugiman. (2023). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.316>
- [38] Tahirah. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- [39] Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 61-78. www.djpk.kemenkeu.go.id
- [40] Vebiani, D., Nugraha, & Dian Hardiana, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 113-126.
- [41] Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97-119. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117>
- [42] Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2044-2070.
- [43] Wulandari. (2019). Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Dasar untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Samudera Indonesia Tbk. Universitas Dharmawangsa.